

CERITA DAMPAK SIAP SIAGA

Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Desa melalui Kerjasama Antar Desa di NTB

September 2023

PROGRAM SIAP SIAGA

- Program lima tahun (2019-2024) yang **didanai oleh Pemerintah Australia** untuk memperkuat manajemen risiko bencana di Indonesia dan keterlibatan antara Australia dan Indonesia dalam bantuan kemanusiaan di Kawasan Indo-Pasifik.
- **Fokus domestik** untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan diri, merespons, dan memulihkan diri dari bencana yang terjadi secara cepat dan lambat.
- **Fokus regional** untuk memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan regional.
- Mendukung **prioritas Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan bencana** di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045.
- Bermitra dengan masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, sejalan dengan **pendekatan pentahelix** Pemerintah Indonesia.
- SIAP SIAGA mengimplementasikan **pendekatan perubahan sistem untuk meningkatkan kesinambungan kebijakan dan kejelasan peran** di sektor penanggulangan bencana di Indonesia, yang dibangun berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dari investasi sebelumnya di sektor ini selama 15 tahun terakhir.
- Program ini bekerja sama dengan, dan memfasilitasi, para pemangku kepentingan untuk **memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan** yang ada serta memanfaatkan kegiatan, jaringan, dan sumber daya yang sedang berlangsung, untuk membantu menghubungkan titik-titik di seluruh sistem dengan meningkatkan koordinasi, pembelajaran rekan sejawat, dan kolaborasi.
- Di NTB, SIAP SIAGA telah bekerja sama dengan Konsepsi dan Mitra Samya dalam Program Pulih Bersama. Kedua organisasi tersebut bekerja di Desa Pemenang Barat dan Malaka (Kabupaten Lombok Utara) serta Desa Selong Belanak dan Tumpak (Kabupaten Lombok Tengah).

Pemeriksaan Realitas Pengarusutamaan PRB di Tingkat Desa

Tantangan yang dihadapi dalam mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam rencana dan program pembangunan desa telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya sumber daya untuk program penanggulangan bencana. Hal ini pada gilirannya berdampak negatif pada kesadaran masyarakat akan PRB sebagai masalah di luar tanggap darurat, dan peran penting yang dimainkan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa kesulitan untuk mengoperasionalkan kebijakan, peraturan, standar, dan indikator yang diturunkan dari tingkat nasional ke tingkat kecamatan. Memahami bagaimana semua elemen ini bekerja bersama dan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dapat menjadi hal yang luar biasa. BPBD kabupaten tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis tentang PRB dan pemerintah desa tidak mengetahui/memiliki akses untuk mendapatkan dukungan dari aktor non-pemerintah.



Pemeriksaan Realita: 'Kapasitas' itu kompleks

Kapasitas lebih dari sekedar memahami apa masalahnya. Kapasitas juga berarti memahami peraturan dan bagaimana menerapkannya, lembaga mana yang bertanggung jawab atas apa, memahami sumber daya yang tersedia untuk mendukung rancangan program, dan memiliki proses untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat diikutsertakan dan mendapatkan manfaat dari kegiatan.



Titik Balik: Kesadaran akan Pilihan dan Sumber Daya

Di bawah Program Pulih Bersama yang didukung oleh SIAP SIAGA, Konsepsi dan Mitra Samya memimpin pengembangan kegiatan PRB Lintas Desa, yang mengarah pada peningkatan kesadaran akan peraturan, perencanaan, sumber daya, dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan kapasitas PRB di desa-desa sasaran.

FAKTOR PENDORONG UNTUK PERUBAHAN

Fasilitasi dan Kepemimpinan

Di bawah Program Pulih Bersama, KONSEPSI di Pemenang Barat dan Malaka berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan Tim Siaga Bencana Daerah (TSBD) berkolaborasi dalam serangkaian kegiatan: menyusun kajian risiko bencana (KRB) berdasarkan KRB Lombok Utara, menyelaraskan rencana aksi komunitas PRB, serta menyusun rencana aksi antardesa. Proses fasilitasi ini menyatukan lembaga-lembaga desa termasuk Karang Taruna, BumDesa, TSBD, dan lain-lain, dan menghasilkan kepala desa yang memprakarsai penyusunan Peraturan Bersama tentang PRB Antar Desa dan Forum PRB Antar Desa, karena adanya kesamaan profil risiko, demografi, dan topografi di dua desa.

Meningkatkan Keterpaduan Kebijakan

Peraturan Bersama ini telah diselaraskan dengan :

- UU No. 6/2014 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang PRB berbasis wilayah/antar desa
- Permendagri No. 96/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup peluang pembiayaan penanggulangan bencana antar desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di mana PRB kerja sama desa merupakan bagian dari proses perencanaan kawasan perdesaan;
- Peraturan Pemerintah No. 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mendorong BUMDES Bersama antara satu desa atau lebih untuk memperkuat ketahanan ekonomi antar desa;
- Peraturan Gubernur No. 84/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan DRV di Provinsi NTB.

Koordinasi Multipihak

Koordinasi antara pemangku kepentingan terkait di tingkat desa:

- Menyepakati nota kesepahaman terkait kegiatan kerjasama PRB.
- Implementasi dari Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut adalah dengan membentuk lembaga Forum PRB antar desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan oleh desa.

Berfokus pada Inklusi

Perwakilan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dilibatkan dalam diskusi dan pengembangan peraturan bersama selama proses berlangsung. HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) di Lombok Utara terlibat aktif untuk mengadvokasi pentingnya PRB inklusif untuk memenuhi hak dan mengakui potensi peran penyandang disabilitas. HWDI juga melaksanakan proyek PRB inklusif di Pemenang Barat dan Malaka, melanjutkan penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, yang melibatkan TSBD dan lembaga desa lainnya.

Bersamaan dengan proses pengembangan peraturan bersama, BPBD Lombok Utara telah memanfaatkan praktik-praktik baik ini dalam pengembangan Rencana DM-nya.



Membangun semangat ketangguhan mungkin mudah, tapi jangan lupa untuk bertanya kepada komunitas tentang 'ketangguhan' seperti apa yang mereka inginkan. Jawaban mereka akan menentukan solidaritas dan keberlanjutan dari ketangguhan itu sendiri. (Hairul Anwar, Manajer Program, Konsepsi)



MENGHUBUNGKAN INFORMASI UNTUK MODEL PRB DESA YANG KOLABORATIF



Menciptakan Model Proses Pengarusutamaan PRB di Tingkat Desa

- Meningkatkan kesadaran desa, termasuk kelompok rentan, tentang strategi, rencana, dan tindakan yang efektif untuk mengantisipasi, menghindari, mempersiapkan, mengatasi, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.
- Penyusunan dokumen-dokumen seperti KRB dan Rencana Pembangunan Desa secara inklusif dan partisipatif.
- Pengaktifan (kembali)/pembentukan relawan (gabungan) TSBD, Forum PRB, BUMDesa.
- Memanfaatkan [perangkat/program ketangguhan](#) seperti Kajian Ketangguhan Desa, Model Desa Tangguh Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBK)/Model Desa Tangguh Bencana Berbasis Kesejahteraan untuk perencanaan dan penganggaran desa.
- Memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antar desa.

PEMERIKSAAN REALITAS DAMPAK YANG MUNCUL

- DRA, Rencana Kontinjensi, dan Peraturan Bersama akan menjadi dasar bagi Kebijakan PRB desa dan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, dengan fokus pada penguatan komponen ketangguhan bencana (termasuk indikator ketangguhan nasional dan program PRB yang berkelanjutan)
- Kesadaran pemerintah akan peran aktor non-pemerintah telah membuat kedua desa memberikan bantuan keuangan kepada Forum PRB antar desa untuk melaksanakan kegiatan kolaboratif untuk meningkatkan ketangguhan, sejalan dengan rencana pembangunan desa.
- Meningkatnya kesadaran akan perlunya koherensi kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten telah tercermin dalam rencana kerja lembaga kabupaten, termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan BAPPEDA, dengan prioritas untuk mengembangkan strategi baru untuk daerah pedesaan dengan pendekatan berbasis PRB dan untuk memberikan bantuan teknis kepada desa-desa untuk mengarusutamakan PRB ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Apa Selanjutnya :



KONSEPSI dan Kabupaten Lombok Utara sedang dalam proses menyusun Peraturan Bupati tentang Peraturan Bersama untuk PRB di tingkat desa, dengan menggunakan praktik/model dari kolaborasi Pemenang Barat dan Malaka. SIAP SIAGA juga akan bekerja sama dengan BPBD Lombok Utara, pemerintah desa, serta Konsepsi dan Mitra Samya untuk menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah dengan Kementerian Dalam Negeri, BNPB, dan Kementerian Desa untuk menilai model ini dan menentukan bagaimana meningkatkan implementasi melalui sistem insentif nasional.

SEBELUM

Terbatasnya kesadaran dan pemahaman pemerintah desa tentang ruang lingkup PRB

Kurangnya kapasitas pemerintah desa untuk mengakomodasi persyaratan kebijakan dan peraturan yang kompleks

Lembaga PRB desa belum terbentuk/tidak aktif

Tidak ada kesadaran akan opsi untuk berkolaborasi dengan desa-desa tetangga atau penggunaan sumber daya non-pemerintah untuk mencapai target PRB dalam rencana pembangunan.

PERAN SIAP SIAGA



PENILAIAN SISTEM



FASILITASI



DUKUNGAN TERHADAP
PEMBELAJARAN



BANTUAN TEKNIS STRATEGIS

SESUDAH

Penerbitan Peraturan Bersama Desa tentang Kerja Sama PRB dipuji sebagai praktik yang baik oleh Kabupaten Lombok Utara, dan merupakan insentif penting bagi pemerintah desa untuk mengarusutamakan kegiatan dan program PRB (termasuk PRBBK/WDRV) ke dalam rencana dan anggaran pembangunan desa

Sebagai hasil dari Peraturan Bersama Desa, Desa Pemenang Barat dan Desa Malaka telah mengalokasikan sumber daya anggaran untuk Forum Bersama PRB untuk melaksanakan dan memantau kegiatan PRB desa



TERIMA KASIH